

**MANAJEMEN PEMERINTAHAN DINAS KESEHATAN DALAM
PENANGGULANGAN STUNTING DI DESA KEPAYANG KABUPATEN
ROKAN HULU TAHUN 2018**

Oleh : Sherly Deffi Octaviani

Email: sherlydevi580@gmail.com

Dosen Pembimbing: Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru

28293

Telp/fax. 0761-63277

ABSTRACT

Stunting is a condition in which a person's height is shorter than the height of other people in general (who are the same age). Stunting occurs in infants (0-11) months and children under five (12-59) months due to chronic malnutrition, especially in 1,000 first day of life (HPK). The Regional Government of Rokan Hulu Regency is trying to reduce the stunting rate in Rokan Hulu. The Rokan Hulu District Health Office is the agency responsible for regulating health services in the Rokan Hulu Regency area. The prevention of stunting reduction aims to carry out efforts to reduce stunting in Riau Province, especially in Rokan Hulu Regency.

This study seeks to answer the researcher's questions as follows: How is the Management of the Health Office in dealing with stunting in Rokan Hulu Regency in 2018, what factors are the obstacles in overcoming stunting in Kepayang Village, Rokan Hulu Regency in 2018. This research also aims to describe Management of the Health Office in overcoming stunting in Kepayang Village, Rokan Hulu Regency, then also to describe the factors that are obstacles in overcoming stunting in Rokan Hulu Regency. This type of research used by the author in this study is descriptive. Data collection techniques are interviews, literature study and documentation. The data analysis technique in this study was carried out qualitatively.

The results of the study explain that the Government Management in tackling stunting in Kepayang Village, Rokan Hulu Regency has not been maximized due to the lack of coordination of Regional Apparatus Organizations (OPD) in the problem of stunting prevention, so that several indicators consist of planning policies and programs, organizing government structures, financial management, coaching. and personnel development, general decision-making, program management, political oversight. Not going well. In its implementation there are also several inhibiting factors such as Human Resources, Budget, and Infrastructure / Facilities and Infrastructure.

Keywords: government management, prevention, stunting.

PENDAHULUAN

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “ Kesehatan adalah keadaan sehat, baik fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.” dan pasal 4 yang menyebutkan bahwa “ Setiap orang berhak atas kesehatan”

Masalah gizi pada hakikatnya adalah masalah kesehatan masyarakat, namun penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja. Penyebab timbulnya masalah gizi adalah multifaktor, oleh karena itu pendekatan penanggulangan harus melibatkan berbagai sektor terkait. Pada saat ini, Indonesia menghadapi masalah gizi ganda, yaitu masalah gizi kurang dan masalah gizi lebih, masalah gizi kurang umumnya disebabkan oleh kemiskinan, kekurangan persediaan pangan, kurang baiknya kualitas lingkungan (*sanitasi*), kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi, menu seimbang dan kesehatan dan adanya daerah miskin gizi (*iodium*).

Stunting merupakan kondisi dimana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya (yang seusia). *Stunting* dapat diketahui pada bayi yang berusia (0-11) bulan dan anak balita (12-59) bulan akibat dari kekurangan gizi kronis terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir, tetapi kondisi *stunting* baru nampak setelah anak berusia 2 tahun. Kondisi *stunting* membawa dampak perkembangan seseorang dimasa dewasanya. Kemampuan kognitif yang rendah, mudah terinfeksi penyakit, menjadi kurang produktif dan tentunya akan melahirkan anak-anak yang kondisinya juga sama, sehingga masalah

stunting menjadi penghambat dari pembangunan manusia Indonesia yang cerdas dan produktif. (Rri, 2019)

Saat ini "Kabupaten Rokan Hulu masuk dalam 10 Kabupaten/Kota di Indonesia dengan tingkat kesadaran masyarakat terendah terhadap gizi, Rohul masuk dalam catatan kementerian kesehatan sebagai daerah yang akan dilakukan intervensi untuk penanganan masalah gizi". Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau 10 desa itu antara lain, Senaming, Suka Maju, Tambusai Timur, Kepenuhan Hilir, Ulak Patian, Rambah Samo, Marga Mulya, Teluk Aur, Bangun Purba Barat dan Desa Kepayang. 10 desa ini berada di 6 Puskesmas, yakni Puskesmas Rambah, Tambusai, Kepenuhan, Rambah Samo I, Bangun Purba, dan Kepenuhan Hulu (sindonewas, upaya pemerintah dalam mengatasi *stunting*, 2019). Desa yang paling banyak mengalami *stunting* terletak di Desa kepayang yang terletak di Kecamatan Kepenuhan Hulu.

Tabel 1 Jumlah Balita Kurus dan Stunting di (6 Puskesmas dan 10 Desa) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018

No	Kecamatan	Desa	Jumlah balita kurus	Jumlah stunting
1	Rambah	Menaming	27	58
		Suka maju	15	82
2	Tambusai	Tambusai timur	44	114
3	Kepenuhan	Kepenuhan hilir	12	70
		Ulak patina	14	83
4	Rambah Samo	Rambah samo	20	72
		Marga	23	70

		mulya		
		Teluk aur	12	48
5	Bagun Purba	Bagun purba barat	11	66
6	Kepenuhan Hulu	Kepayang	24	147

Sumber: pedoman pelaksanaan penurunan *stunting* terintegrasi Kabupaten Rokan Hulu

Seperti yang dilihat dalam data di atas Desa kepayang merupakan desa yang paling banyak mengalami *stunting* dengan status Puskesmas belum terakreditasi dan menjadi lucus program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga di tahun 2018, karena hal tersebut peneliti menjadikan Puskesmas Desa Kepayang sebagai salah satu lokus penelitian. Dimana puskesmas di Kecamatan Kepenuhan Hulu Desa Kepayang terdiri dari 3 Dusun, jumlah Posyandu 15 Pos, jumlah PAUD 5 (1 disetiap Desa) dan 1 buah TK. Adapun penderita *stunting* perdusun ialah Dusun satu jumlah balita *stunting* 43 orang, dusun dua jumlah balita *stunting* 25 orang, dusun tiga jumlah balita *stunting* 79 orang.

Namun dalam Manajemen Pemerintahannya masih terdapat kendala dimana sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan dalam BAB IV tugas dan fungsi Kepala Dinas pasal 5 ayat 2 dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai fungsi pembinaan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan, kurangnya Manajemen Pemerintahan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan penanggulangan *stunting* Tahun 2018. Hal ini terlihat dari masih tingginya tingkat *stunting* di Kabupaten Rokan Hulu dan kurangnya koordinasi antara (organisasi perangkat daerah) OPD dan pemerintah desa dalam pemahaman *stunting*.

RUMUSAN MASALAH

Sebagaimana dijelaskan masalah di atas, maka dapat di rumuskan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana Manajemen Pemerintahan Dinas Kesehatan dalam penanggulangan *Stunting* di Desa Kepayang Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam Penanggulangan *stunting* di Desa Kepayang Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 ?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Manajemen Pemerintahan Dinas Kesehatan dalam Penanggulangan *Stunting* di Desa Kepayang Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Kesehatan dalam Penanggulangan *stunting* di Desa Kepayang Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018.

KERANGKA TEORI

1. Manajemen Pemerintahan

Menurut Ryas Rasyid mengemukakan bahwa manajemen pemerintahan diarahkan agar lebih dahulu mendefinisikan “hasil apa” yang dicapai dengan uang, peralatan, keahlian, dan tenaga kerja yang dikerahkan. Ia berhubungan dengan target yang ingin dicapai oleh setiap unit dalam suatu periode tertentu. Manajemen pemerintahan juga menganut prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, dan inovasi dalam proses menghimpun dan mengerakkan orang-orang memperoleh dan mengunakan uang, serta mengadakan,

mempergunakan, dan memelihara peralatan demi tercapainya tujuan organisasi (Rasyid, 2004).

Pelaksanaan manajemen pemerintahan mencakup beberapa bidang kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan kebijakan dan program

Perencanaan kebijakan dan program kegiatan ini didahului oleh penelitian dan analisa atas berbagai bidang permasalahan.

2. Pengorganisasian atas struktur pemerintahan

Pengorganisasian atas struktur pemerintahan yang mencakup upaya menjaga keserasian dalam hubungan antara departemen, membina keseimbangan antara otonomi dan integrasi, mengalokasikan program dan tanggung jawab secara vertikal dan horizontal, membina hubungan lini dan staf, memelihara hubungan anatara kantor pusat dan unit-unit lapangan, memperbaiki jaringan komunikasi dan mendorong partisipasi.

3. Pengelolaan keuangan

Pengelolaan keuangan yang mencakup penyembangan anatara pemebelajaan dan penerimaan dalam proses penyusunan anggaran, pengalokasian uang dari hasil penerimaan ke unit-unit pemerintahan pada setiap tingkatan. Pengawasan atas pelaksanaan anggaran, penerapan metode evaluasi yang efektif untuk mengukur keberhasilan program dan ketaatan pada aturan yang berlaku, serta pemberdayaan anggaran pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemeliharaan stabilitas.

4. Pembinaan dan pengembangan personil

Pembinaan dan pengembangan personil yang mencakup penyeleksian calon, pengangkatan, penempatan, promosi, penegakan disiplin, dan pemberian insentif serta penghargaan. Dalam konteks pengembangan dilakukan pelatihan untuk

pelayanan umum, pelatihan penjenjangan, pelatihan teknis, dan pelatihan-pelatihan yang bersifat penyerangan. Penilaian atas prestasi unit kerja dan prestasi individual pegawai juga merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Ini di kembangkan dalam konteks kompetisi. Kepada mereka yang prestasinya tinggi, perlu di beri imbalan penghargaan dan promosi.

5. Pengambilan keputusan secara umum

Pengambilan keputusan yang secara umum berkenan dengan pendefenisian masalah yang di hadapi, perumusan jalan keluar yang layak atas masalah, serta penentuan starategi untuk membangun dukungan bagi pemecahan masalah itu. Secara spesifik ia mencakup penentuan tujuan dan rencana untuk mencapainya, perumusan kebijakan, penugasan kepada siapa suatu kebijakan dipercayakan pelaksanaanya, penentuan stategi untuk pelaksanaan kebijakan, serta ketelitian dalam menaati prosedur administrasi dan hubungan hukum.

6. Program pengelolaan

Program pengelolaan yang mencakup kepemimpinan, delegasi kewenangan, dan penugasan-penugasan yang lebih spesifik kepada unit-unit dan penjabat-penjabat, serta koordinasi.

7. Pengawasan politik

Pengawasan politik yang mencakup penegakan hukum, pertanggung jawaban publik, hubungan dengan lembaga-lembaga perwakilan-perwakilan, dan kepedulian pada etika pemerintahan yang berlaku (Rasyid, 2004).

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Sumber Data informasi penelitian adalah dokumen.

Tabel 2 Daftar Informan Penelitian

No	Informasi Penelitian	Jumlah Informasi
1	Kepala dinas kesehatan	1
2	Kepala bidang stunting	1
3	Camat Kepenuhan Hulu	1
3	Puskesmas	1
4	Kepala Desa	1
5	Masyarakat	4
Jumlah		9

Sumber: data lapangan 2018

Teknik pengumpulan data: wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Teknik analisa data: metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Manajemen Pemerintahan Dinas Kesehatan dalam penanggulangan *Stunting* di Desa Kepayang Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018

Setiap organisasi memerlukan manajemen yang baik, tidak terkecuali pada pemerintahan. Manajemen yang baik akan menentukan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin di capai secara efektif dan efisien. Dalam penanggulangan *stunting* Manajemen Pemerintah Daerah juga sangat berperan penting untuk mencapai tujuan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menangani *stunting*. Manajemen yang baik tersebut adalah Manajemen yang mampu mencapai hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dengan cara membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target yang direncanakan. Dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Rokan Hulu perlu dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya tumbuh

kembang anak. *Stunting* mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kesadaran anak tidak maksimal hal ini beresiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa. *Stunting* juga menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit anak *stunting* beresiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Bahkan, *stunting* berbagai bentuk masalah gizi diperkirakan berkontribusi pada hilangnya 2-3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

a. Perencanaan Kebijakan dan Program

Perencanaan merupakan hal yang paling utama dilakukan dalam suatu manajemen. Karena dalam perencanaan inilah di bentuk suatu tujuan bersama yang ingin dicapai oleh organisasi maupun pemerintah. Dalam Manajemen Pemerintahan, perencanaan adalah proses penetapan sasaran dan pemilihan cara untuk mencapai sasaran tersebut (Salam, 2004).

Dalam hal ini, perencanaan kebijakan dan program dalam penanggulangan *stunting* Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu juga telah menyusun Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting*. Periode 2018-2024 (*Stranas Stunting*). Tujuan adalah mempercepat pencegahan *stunting* dalam kerangka kebijakan dan institusi yang ada tujuan tersebut akan di capai melalui lima tujuan khusus:

- Memastikan pencegahan *stunting* menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan,
- Meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah *stunting*
- Memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, dan desa

- d. Meningkatkan akses terhadap makan bergizi dan mendorong ketahanan pangan,
- e. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan perkembangan.

Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Rokan Hulu sebagai dasar Manajemen Pemerintahan dalam penanggulangan *stunting*. Dalam melakukan perencanaan tidak lepas dari pengetahuan pengelolaan program itu sendiri mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

b. Pengorganisasian Atas Struktur Pemerintahan

Pengorganisasian atas struktur pemerintahan yang mencakup upaya menjaga keserasian dalam hubungan antara departemen, membina keseimbangan antara otonomi dan intergrasi, mengalokasikan program dan tanggung jawab secara vertikal dan horizontal, membina hubungan lini dan staf, memelihara hubungan anatara kantor pusat dan unit-unit lapangan, memperbaiki jaringan komunikasi dan mendorong partisipasi.

Pada tahap pengorganisasian atas struktur pemerintahan dalam penanggulangan *stunting* ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu untuk menjalankan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang penurunan kekurangan gizi kronis di Kabupaten Rokan Hulu. Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu membuat SOP (Standar Oprasional Prosedur) dari percepatan penurunan *stunting* dengan mengeluarkan keputusan Kepala Dinas Kabupaten Rokan Hulu Nomor: kpts.440/Diskes/1710/2018 tentang pembentukan susunan keanggotaan tim satuan tugas penurunan kekurangan gizi

kronis/ penanggulangan *stunting* di Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan turunan dari Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Penurunan Kekurangan Gizi Kronis.

Adapun susunan keanggotaan tim satuan tugas percepatan penurunan *stunting* Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Tim Percepatan Penurunan Kekurangan Gizi Kronis (*Stunting*) Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018

NO	Jabatan	Kedudukan
1	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu	Ketua
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu	Wakil ketua
3	Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu	Sekertaris
4	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu	Kordinator bidang pendidikan
5	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Rokan Hulu	Kordinator bidang ketahanan pangan
6	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu	Kordinator air bersih dan sanitasi
7	Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga	Kordinator keluarga berencana

	Berencana Kabupaten Rokan Hulu	
8	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Rokan Hulu	Kordinator jaminan sosial
9	Kepala Dinas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu	Kordinator penggerakan desa dan masyarakat
10	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu	Kordinator lingkungan hidup
11	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rokan Hulu	Kordinator penggerakan posyandu
12	Camat Kepenuhan Hulu	Anggota
13	Kepala Desa Kepayang	Anggota
14	Pkk Kepayang	Anggota

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Tahun 2018

Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu telah membuat tim percepatan penurunan kekurangan gizi kronis (*stunting*) di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2018 dari kepala Dinas Kesehatan sampai ke tua tim penggerakan pkk Kabupaten Rokan Hulu dan pkk desa kepayang.

c. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan yang mencakup penyeimbangan antara pembelanja dan penerimaan dalam proses penyusunan anggaran, pengalokasian uang dari hasil penerimaan ke unit-unit pemerintahan pada setiap tingkatan. Pengawasan atas pelaksanaan anggaran,

penetapan metode-evaluasi yang efektif untuk mengukur keberhasilan program dan ketaatan pada aturan yang berlaku, serta pemberdayaan anggaran pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemeliharaan stabilitas.

d. Pembinaan dan Pengembangan Personil

Pembinaan dan pengembangan personil yang mencakup penyeleksian calon, pengangkatan, penempatan, promosi, penegakan disiplin, dan pemberian insentif serta penghargaan. Dalam konteks pengembangan dilakukan pelatihan untuk pelayanan umum, pelatihan penjenjangan, pelatihan teknis, dan pelatihan-pelatihan yang bersifat penyerangan. Penilaian atas prestasi unit kerja dan prestasi individual pegawai juga merupakan kegiatan yang harus dilakukan ini di kembangkan dalam konteks kompetisi kepada mereka yang prestasinya tinggi, perlu di beri imbalan penghargaan dan promosi.

Terkait dengan pembinaan dan pengembangan personil dalam hal ini lembaga-lembaga atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu yang bertugas dalam menanggulangi *stunting* yang berada di Kecamatan Kepenuhan Hulu, Desa Kepayang dinilai masih kurang. Lembaga-lembaga atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait seperti Pertanian, Ketahanan Pangan, Perumahan Masyarakat, Pendidikan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kelautan, Perikanan, dan Pekerjaan Umum. Lembaga-lembaga tersebut ditunjuk berdasarkan Surat Edaran Bupati Rokan Hulu Nomor: 440 / Dinkes – UM / 13.17 tentang Implementasi Komunikasi Perubahan Perilaku Masyarakat Untuk Mencegah *Stunting*.

e. Pengambilan Keputusan Secara Umum

Pengambilan keputusan yang secara umum berkenaan dengan pendefinisian masalah yang di hadapi, perumusan jalan keluar yang layak atas masalah, serta penentuan strategi untuk membangun dukungan bagi pemecahan masalah itu. Secara spesifik ia mencakup penentuan tujuan dan rencana untuk mencapainya, perumusan kebijakan, penugasan kepada siapa suatu kebijakan dipercayakan pelaksanaannya, penentuan strategi untuk pelaksanaan kebijakan, serta ketelitian dalam menaati prosedur administrasi dan hubungan hukum.

Pengambilan keputusan secara umum pada penanggulangan *stunting* dalam pelaksanaannya Dinas Kesehatan berserata Puskesmas, dan pemerintah Desa kepayang akan mengevaluasi mengenai kinerja, mengenal masalah yang di hadapi dan juga solusi dari permasalahannya.

f. Program Pengelolaan penanggulangan stunting

Program pengelolaan yang mencakup kepemimpinan, delegasi kewenangan, dan penugasan-penugasan yang lebih spesifik kepada unit-unit dan penjabat-penjabat, serta koordinasi, dalam penanggulangan *stunting*.

g. Pengawasan Politik

Pengawasan politik yang mencakup penegakan hukum pertanggung jawaban publik, hubungan dengan lembaga-lembaga perwakilan-perwakilan, dan kepedulian pada etika pemerintahan yang berlaku.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dinas Kesehatan dalam penanggulang Stunting di Desa Kepayang Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018.

Dengan diterapkannya kebijakan ada faktor-faktor yang mempengaruhi baik itu yang menjadi kendala ataupun faktor pendukung dalam pelaksanaannya begitu

juga dengan Manajemen Pemerintahan oleh Dinas Kesehatan Dalam Menanggulangi *Stunting* di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018.

1. Sumber Daya Anggaran dan Dana

Kesediaan anggaran sangat jelas terlihat bahwa sekecil apapun inisiatif pemerintah yang akan diterapkan. Hal ini membutuhkan sejumlah sumber daya finansial untuk membiayainya. Pemerintah daerah tertentu harus memiliki jaringan yang cukup terhadap berbagai sumber dana yang ada memiliki orientas untuk menganggarnya. Dana yang di butuhkan tidak sekedar untuk investasi belaka, namun perlu pula dianggarkan untuk biaya program, kegiatan dan pengembangan di kemudian hari. Ketersediaan dana dan anggaran adalah hal yang paling penting dalam penanggulangan *stunting*. Karena apabila ada kendala di dana dan anggaran maka proses penanggulangan *stunting* juga akan terhambat.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dari Sumber Daya Manusia dimana kurang kesadaran Masyarakat terkait pentingnya pola hidup sehat yang meliputi kesehatan lingkungan, dan asupan makanan bergizi.

3. Infrastruktur /Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Pelaksanaan program yang di lakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu yang berada di kecamatan Kepenuhan Hulu di Desa Kepayang dalam penanggulangannya *stunting*. Pencapaian suatu program dan kegiatan yang dibina

tentu menjadi faktor yang akan mempengaruhi pelaksanaan pembinaan. Hal ini membuat lokasi akan berdampak pada program dan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan *stunting*.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil yang telah peneliti lakukan sebagaimana telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian terkait manajemen Dinas Kesehatan dalam penanggulangan *stunting* di Desa kepayang Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

1. Manajemen Pemerintahan adalah kebijakan-kebijakan yang di buat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai kebijakan-kebijakan tertentu di masyarakat. Dimana Manajemen Pemerintahan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dalam Penanggulangi *stunting* belum maksimal karena kurangnya koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam permasalahan penanggulangan *stunting*, sehingga beberapa indikator yang terdiri dari perencanaan kebijakan dan program, pengorganisasian atas struktur pemerintahan, pengelolaan keuangan, pembinaan dan pengembangan personil, pengambilan keputusan secara umum, program pengelolaan, dan pengawasan politik belum berjalan dengan baik.
2. Bahwa dalam manajemen pemerintahan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu dalam Penanggulangan *stunting* di

Kabupaten Rokan Hulu terdapat beberapa faktor penghambat yaitu: Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Infastruktur dan Anggaran.

SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Manajemen Pemerintahan dalam penanggulangan *stunting* oleh Dinas kesehatan Kabupaten Rokan Hulu peneliti ingin memberikan saran, adapun saran tersebut:

1. Pemerintah Daerah mulai dari Kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/Desa dan rukun warga memiliki persamaan persepsi dalam penanggulangan *stunting* melalui penyebaran informasi yang merata tentang *stunting* dalam pembangunan manusia Indonesia, persamaan persepsi ini akan mempermudah program kerja yang dapat mendukung penanggulangan *stunting*.
2. Dinas Kesehatan harus lebih meningkatkan koordinasi anatar bidang agar penanggulangan *stunting* dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan utama.
3. Pemerintah desa harus melakukan pendataan penduduk lebih baik dan merata sehingga tidak di temukan lagi masyarakat pendatang yang tinggal dan berpindah pihak pelaksana program melakukan pendataan.

Daftar Pustaka

Buku

Ahmad, R. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif* hlm 124-125. Yogyakarta: ar-ruzz.

Arikunto, S. (2000). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ghony, D., & Almanshur, f. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif hlm 14*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Istianto. (2011). *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayan Publik hlm 29*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Nawawi, Z. (2015). *Manajemen Pemerintahan hlm 21*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nazir. (2005). *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia .

Nor, J. (2012). *metode penelitian : skripsi, thesis, disertasi dan karya ilmiah*. Jakarta: charisma putra utama.

Rasyid, R. (2004). *Makna pemerintahan (tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan) hlm 150-152*. Jakarta: mutiara sumber widya.

Salam, S. (2004). *Manajemen Pemerintahan Indonesia hlm 52*. Jakarta: Djambatan.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D hlm35*. Bandung: Alfabeta .

Syefei, k. I. (2011). *System Administrasi Negara Republik Indonesia hlm 118*. Jakarta: Pt Bumi Aksara.

Taliziduhu, N. (2011). *Kybernology (Ilmu Pemerintah) jilid 1 hlm 160*. Jakarta: Rineka Cipta.

Terry, R. G. (2013). *Prinsip-Prinsip Manajemen hlm 17*. Bandung : Bumi Aksara

Jurnal

ArisandyWinda. (2015). strategi Dinas Kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui metode CRC (cityzen Report Card). *JOURNAL.UNAIR.AC.ID*, 12.

fiandy, S. r. (2018). “Pengaruh kerja dinas kesehatan kota pekanbaru terhadap perbaikan gizi masyarakat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru. *Jom.unri.ac.id*, 2-3.

Nurjaman, Asep , Hadi, & Krisno. (2017). Organiosasi Dan Manajemen Pemerintahan. *Jurnal.ut.ac.id*, 14-16.

setiawan eko, Mahcmud Rizanda, & masrul. (2018). Faktor-faktor yang berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 24-59 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang. *jurnal.fk.unand.ac.id*, 275-276.

Website

Beritasatu. (2019, Oktober 3). *pemda harus aktif atasi stunting*. Retrieved Oktober 2, 2019, from <https://beritasatu.com+pemda+harus+aktif+atasi+stunting+akses%3A2+oktober+2019&oq:https://beritasatu.com>

beritasatu. Retrieved oktober 2, 2019, from <https://beritasatu.com+pemda+harus+aktif+atasi+stunting+akses%3+oktober+2019&oq:akses2oktober2019> .:

Rri. (2019, Oktober 14). *Gizi Buruk dan Kurang GIzi Masih Terjadi di Riau*. Retrieved Oktober 2, 2019, from <https://rri.co.id+gizi+buruk+dan+kurang+gizi+masih+terjadi+di+riau2c+akses%14+okt>

ober+2019&oq akses 2 oktober 2019:
<https://rri.co.id>

sindonewas. (2019, Oktober 5). *upaya pemerintah dalam mengatasi stunting*. Retrieved Oktober 2, 2019, from <http://sindonewas.com+upaya+pemerintah+>

dalam+mengatasi+stunting+di+akses+%3A
+2+oktober+2019: <http://sindonewas.com>

.